

PENYERAPAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2013

INTISARI

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan rendahnya penyerapan Anggaran Bantuan Hukum periode tahun 2013, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sebesar 16,30%. Tujuan dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Bantuan Hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana faktor-faktor tersebut berpengaruh.

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik utama pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dan dokumentasi dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dan Organisasi Bantuan Hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pelaksana Bantuan Hukum. Data yang diperoleh dikelompokkan dengan kategori pengelompokkan berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik baik menurut Van Meter dan Van Horn maupun menurut Marilee S. Grindle. Dari kelompok data yang ada, dipilih 3 (tiga) kelompok variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penyerapan Anggaran Bantuan Hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Bantuan Hukum di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013 adalah: (1) karakteristik Organisasi Bantuan Hukum baik itu berkaitan dengan tipe kelembagaan Organisasi Bantuan Hukum itu sendiri maupun berkaitan dengan tipe perkara hukum yang ditangani yang mana Organisasi Bantuan Hukum yang menangani perkara-perkara pidana mampu menyerap anggaran lebih banyak, (2) isi kebijakan baik berkaitan dengan berkas pelaporan kegiatan Bantuan Hukum yang tidak selalu mudah untuk didapatkan seperti dokumen identitas dan surat keterangan miskin maupun berkaitan dengan sumber daya waktu yang terlalu singkat baik untuk pelaksanaan maupun pelaporan kegiatan Bantuan Hukum, serta (3) hubungan antar organisasi dimana komunikasi tidak berjalan dengan baik, yang mana seringkali informasi tidak disampaikan dengan cepat dan tidak terdapat koordinasi yang baik diantara aparaturnya penegak hukum.

Ketiga hal tersebut menyebabkan tidak banyak perkara yang mampu ditangani dan dilaporkan pada akhir waktu pengajuan *reimburse*, yang berakibat pada tidak terserapnya Anggaran Bantuan Hukum yang ada.

Kata kunci: Bantuan Hukum, implementasi kebijakan, penyerapan anggaran

**ABSORPTION OF THE LEGAL AID BUDGET
IN THE REGION OF DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIOD OF 2013**

ABSTRACT

This thesis is motivated by the problem of low absorption of Legal Aid Budget period of 2013, particularly in the region of Daerah Istimewa Yogyakarta, is amounting to 16.30%. The purpose of the study of the problem is to determine the factors that influence the absorption of Legal Aid Budget in the region of Daerah Istimewa Yogyakarta and how these factors influence.

The study used qualitative research methods with the main techniques of data collection were interviews and documentation. Interviews and documentation conducted at the Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta and the Organisasi Bantuan Hukum in the region of Daerah Istimewa Yogyakarta as the implementer of the Legal Aid. The data obtained are grouped by category grouping based on the variables that affect the implementation of public policy either by Van Meter and Van Horn or by Marilee S. Grindle. From the existing data group, select 3 (three) groups of variables that have the most impact on Legal Aid Budget absorption in the region of Daerah Istimewa Yogyakarta period of 2013.

The results showed that the factors that influence the absorption of Legal Aid Budget in the region of Daerah Istimewa Yogyakarta period of 2013 are: (1) Organisasi Bantuan Hukum characteristics, either related to the type of institution the Organisasi Bantuan Hukum or relating to the type of lawsuit that dealt, which is the Organisasi Bantuan Hukum that handles criminal cases be able to absorb more budget, (2) a content of policy, either related to the reporting files Legal Aid activities that are not always easy to obtain such as identity documents and poor evidence documents, or related to the resources of time is too short both for implementation and reporting activities of the Legal Aid, and (3) inter-organizational relationships, where communication is not going well, and information is often not delivered quickly and there is no proper coordination between law enforcement agencies.

Those things cause only a few cases that can be handled and reported at the end of the time of filing reimbursement, which resulted is not absorbed the Legal Aid Budget.

Keywords: Legal Aid, policy implementation, absorption budget